

PENDIDIKAN POLITIK UPAYA MENDORONG PARTISIPASI PEMILIH PEREMPUAN DALAM MENGHADAPI PEMILU 2024

*Political Education as an Effort to Encourage Women's Voter
Participation in the 2024 General Election*

Zona Rida Rahayu

Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok, Indonesia

e-mail: zonaridarahayu550@gmail.com

Hardinalis Kobal

Universitas Taman Siswa, Padang, Indonesia

e-mail: hardinalis.73@gmail.com

Abstract

The presentation of community service on political education efforts to increase female voter participation in the 2024 election needs to be done. This is based on the number of female and male voters which is almost the same, with the assumption that female voters are more loyal, and there are few female regional head candidates. This activity was carried out in the form of a workshop. Attended by 100 participants from Solok Regency representing Yasinan groups, gymnastics clubs, Community leaders-Bundo Kandunga, and PAUD teachers. This activity was held on December 23, 2023 at the Premier Hotel, Solok City. This political education is important to be given to all voters, especially female voters. This is because it is necessary to pay attention to the principles of justice and gender equality which are aimed at increasing political participation and women's initiatives, as well as increasing independence and maturity in national and state life. There are several driving factors in efforts to increase female voter participation. These factors include affirmative policies, gender education and awareness, support from non-governmental organizations, social and cultural change, and networking and mentoring. Efforts to increase women's political participation require effective strategies that can be applied in various political situations. First, improving education and political awareness. Second, is building networks and alliances. Third, providing ongoing guidance and services.

Keywords-- Pendidikan Politik, Partisipasi Perempuan, Pemilihan

1. PENDAHULUAN

Pemilih perempuan selalu menarik bagi kalangan peserta pemilu. Begitu juga dengan pemilihan gubernur/bupati/walikota yang berlangsung 27 November 2024. Hal ini disebabkan jumlah pemilih perempuan dan laki-laki hampir sama, adanya asumsi pemilih perempuan lebih loyal, dan sangat sedikit calon kepala daerah perempuan yang muncul (Rahayu, 2024). *Pertama*, jumlah pemilih perempuan yang hampir sama jumlahnya dengan pemilih laki-laki. KPU Sumatera

Barat merilis jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk konsestasi Pemilu 2024 sebanyak 4.088.606 jiwa dengan rincian 2.207.360 pemilih tetap laki-laki dan 2.061.246 merupakan pemilih tetap perempuan. Bahkan di beberapa daerah bahkan pemilih perempuan lebih banyak daripada jumlah pemilih laki-laki. Di Kota Solok, dari 55.832 orang pemilih terdapat 28.308 pemilih perempuan, sedangkan laki-laki hanya 27.524 pemilih.

Kedua, terdapat asumsi pemilih perempuan lebih loyal daripada pemilih laki-laki. Ini terbukti bahwa pemilih perempuan lebih dapat diandalkan, dan selalu menjadi prioritas peserta pemilu dengan berbagai strategi untuk menggaet mereka. Meskipun loyalitas pemilih perempuan dapat juga bergeser dengan berbagai faktor, terutama dari keluarga. Data dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tahun 2021 menyebutkan bahwa, pemilih perempuan lebih loyal dibandingkan laki-laki. Hal ini tercermin dari mayoritas pengguna hak pilih pada Pemilu 2019 adalah pemilih perempuan. Kondisi ini terjadi karena, kebanyakan perempuan lebih banyak berada di rumah, sehingga memungkinkan pergi ke tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pencoblosan.

Ketiga, sangat sedikit calon kepala daerah perempuan yang muncul. Pada Pilkada di Sumatera Barat peserta pemilu didominasi oleh kaum laki-laki. Data KPU Sumbar menyebutkan terdapat 56 pasangan calon (paslon) kepala daerah yang maju dalam Pilkada serentak Sumbar 2024. Dengan rincian 2 paslon tingkat provinsi dan 54 paslon di kabupaten dan kota. Dari nama yang muncul mayoritas para calon merupakan laki-laki. Sementara pasangan calon perempuan hanya terdapat tiga daerah yakni Kabupaten Solok, Emiko sebagai bakal calon bupati, kemudian Desni Seswinari bakal calon wakil walikota Sawahlunto dan pasangan Annisa Suci Ramadhani dan Leli Arni bakal calon bupati dan wakil bupati Dharmasraya.

Sejalan dengan hal tersebut hasil penelitian Kahpi, (2024) mendeskripsikan beberapa faktor penghambat utama, termasuk budaya patriarki yang masih dominan, kurangnya pendidikan politik, hambatan struktural dalam partai politik, beban ganda yang dialami perempuan, serta kekerasan dan intimidasi politik. Budaya patriarki menempatkan perempuan dalam peran tradisional yang membatasi partisipasi mereka di ranah publik, sementara pendidikan politik yang kurang memadai menghalangi pemahaman dan keterlibatan mereka dalam proses politik. Hambatan struktural dalam partai politik juga menghambat perempuan untuk mencapai posisi kepemimpinan, dan beban ganda sebagai ibu rumah tangga dan pekerja membuat perempuan sulit untuk berpartisipasi secara penuh dalam politik.

Dari penjelasan tersebut ada banyak faktor pendorong yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik. Kebijakan afirmatif, seperti kuota gender dalam partai politik dan parlemen, memberikan peluang lebih besar bagi perempuan untuk terlibat dalam politik. Peningkatan pendidikan politik dan kesadaran gender di masyarakat membantu membangun fondasi yang lebih kuat untuk partisipasi politik perempuan. Dukungan dari organisasi non-pemerintah yang berfokus pada pemberdayaan perempuan juga memainkan peran penting dalam memperkuat kapasitas dan motivasi perempuan dalam politik.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perlu diberikan pendidikan politik upaya mendorong partisipasi pemilih perempuan dalam menghadapi pemilihan 2024.

2. METODE

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk *workshop*. Dihadiri oleh 100 orang peserta dari kabupaten Solok yang mewakili kelompok-kelompok yasinan, *club* senam, tokoh Masyarakat-*Bundo Kanduang*¹, guru PAUD. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2023 di Hotel Premier Kota Solok.

Tahapan Review

Evaluasi pelaksanaan kegiatan Pendidikan Politik Upaya Mendorong Partisipasi Pemilih dalam menghadapi Pemilu Tahun 2024 ini diuraikan dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Tujuan	Indikator Ketercapaian	Tolak Ukur
Peserta kelompok masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok yasinan, <i>club</i> senam, tokoh Masyarakat- <i>Bundo Kandunga</i> , guru PAUD.	Peserta dapat meningkatkan kapasitas pemahaman pendidikan politik	Peserta mengetahui bahwa penting meningkatkan kapasitas pemahaman Pendidikan Politik
	Peserta dapat menerapkan pendidikan politik dalam kelompok-kelompok masyarakat dalam menghadapi pemilu 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta menjelaskan pendidikan politik bagi di pemilih perempuan masyarakat terkait 2. Peserta dapat menjelaskan peran Pendidikan Politik sebagai salah satu faktor pendorong dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih perempuan 3. Peserta dapat menjelaskan upaya apa yang dapat dilakukan dalam meningkatkan partisipasi

Gambaran Kegiatan

Berikut ini adalah gambaran kegiatan 23 Desember 2023 di Hotel Premier Solok.

¹ Sebutan untuk perempuan yang sudah menikah dan merupakan pemimpin Wanita di Minangkabau



Gambar 1. kegiatan pengabdian

Keberlanjutan Kegiatan dalam Kelompok

Keberlanjutan kegiatan pengabdian ini adalah mempersiapkan kelompok-kelompok perempuan. Kelompok ini terdiri dari kelompok yasinan, *club* senam, tokoh masyarakat-*Bundo Kandunga*, guru PAUD. Diharapkan kelompok-kelompok ini memiliki SDM yang mampu bersikap secara cerdas dalam menentukan pilihan pada pemilihan 2024.

Sejalan dengan kegiatan tertuang dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Lebih jelas lagi pada pasal 13 pada huruf e yang berbunyi Partai Politik berkewajiban melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada Masyarakat tentang Peningkatan Kapasitas Masyarakat Mengenai Pendidikan Politik Upaya Medorong Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Menghadapi Pemilihan 2024. Kegiatan yang diadakan pada 23 Desember 2023 lalu. Ada beberapa hal yang disampaikan, yaitu sebagai berikut ini.

Pendidikan Politik bagi Perempuan

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai politik menjelaskan Pendidikan Politik adalah “proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak,

kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara". Selanjutnya, pendidikan politik adalah aktifitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi politik pada individu. Ia meliputi keyakinan konsep yang memiliki muatan politis, meliputi juga loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik (Soeharto, 2012).

Tujuan pendidikan politik serti yang dijelaskan Soeharto, (2012) agar setiap individu mampu memberikan partisipasi politik yang aktif di masyarakatnya. Dengan demikian pendidikan politik memiliki tiga tujuan yaitu.

- 1) membentuk kepribadian politik.
Pembentukan kepribadian politik dilakukan melalui metode tidak langsung, yaitu pelatihan dan sosialisasi, serta metode langsung berupa pengajaran politik dan sejenisnya.
- 2) Kesadaran politik,
menumbuhkan kesadaran politik dapat ditempuh dua metode yaitu dialog dan pengajaran instruktif.
- 3) Partisipasi politik.
Adapun partisipasi politik, ia terwujud dengan keikutsertaan individu-individu secara sukarela dalam kehidupan politik masyarakatnya.

Pendidikan politik ini penting diberikan keluruh pemilih terutama, bagi pemilih perempuan. Hal ini dikarenakan, perlu memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif kaum perempuan, serta meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Omami, 2017).

a. Peran Pendidikan Politik Sebagai Salah Satu Faktor Pendorong dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih Perempuan

Peran Pendidikan Politik

Melalui studi kepustakaan yang dilakukan oleh Omami (2017) tentang peran partai politik di Kota Pontianak dalam melakukan pendidikan politik bagi perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dari kajian ini realitanya masih tidak optimal. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan hal ini adalah sebagai berikut:

- (a) Minimnya anggaran untuk melakukan pendidikan politik;
- (b) Pendidikan politik lebih difokuskan pada kader-kader partai;
- (c) Kurangnya kesadaran politik dari para perempuan di Kota Pontianak.

Langkah-langkah strategi yang dilakukan oleh partai politik dalam mengoptimalkan pendidikan politik bagi perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender adalah: (a) mengajak kaum perempuan untuk ikut serta dalam pendidikan politik yang diselenggarakan bagi kader-kader partai, sehingga bisa menghemat anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan politik bagi perempuan; dan (b) menghimbau kepada kader-kader partai yang berada di wilayah kecamatan dan kelurahan untuk memberikan pendidikan politik kepada

kaum perempuan melalui pertemuan-pertemuan di tingkat RT, RW dan dalam kegiatan keagamaan.

Faktor Pendorong dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih Perempuan

Faktor pendorong dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih perempuan dalam pemilihan 2024 ada beberapa faktor. Faktor ini diantaranya:

Kebijakan Afirmatif: Penerapan kebijakan kuota gender dalam partai politik dan parlemen telah menjadi faktor pendorong utama dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Indonesia. Kebijakan afirmatif ini dipicu berbagi asumsi ketidakadilan gender serta yang dijelaskan Mansour Fakih (dalam Fauzan, 2017) ada lima sebab.

- (1) Terjadi marginalisasi (kemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuan.
- (2) Terjadinya subordinasi pada salah satu jenis sex, yang umumnya pada kaum perempuan. Dalam rumah tangga, masyarakat, maupun Negara, banyak kebijakan dibuat tanpa “menganggap penting” kaum perempuan.
- (3) Pelabelan negatif (*stereotype*) terhadap jenis kelamin tertentu, terutama terhadap kaum perempuan dan akibat dari *stereotype* itu terjadi diskriminasi serta ketidakadilan lainnya. Dalam masyarakat banyak sekali *stereotype* yang dilabelkan kepada kaum perempuan yang akibatnya membatasi, menyulitkan, memiskinkan, dan merugikan kaum perempuan. Karena adanya keyakinan masyarakat bahwa laki-laki adalah pencari nafkah (*bread winner*).
- (4) Kekerasan (*violence*) terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan, karena perbedaan gender kekerasan di sini dimulai dari kekerasan fisik seperti pemerkosaan dan pemukulan, sampai pada kekerasan yang berbentuk lebih halus seperti pelecehan (*Sexual harassment*) dan penciptaan ketergantungan. Banyak sekali kekerasan terjadi pada perempuan yang ditimbulkan karena *stereotype* gender.
- (5) Peran gender perempuan adalah mengelola rumah tangga, banyak perempuan menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama (*burden*). Dengan kata lain ‘peran gender’ perempuan yang menjaga dan memelihara kerapian tersebut telah mengakibatkan tumbuhnya tradisi dan keyakinan masyarakat bahwa mereka harus bertanggung jawab atas terlaksananya semua pekerjaan domestik.

Pendidikan dan Kesadaran Gender: Peningkatan pendidikan politik dan kesadaran gender di masyarakat juga menjadi faktor pendorong. Program-program pendidikan yang menekankan pentingnya kesetaraan gender dan peran perempuan dalam politik dapat membangun fondasi yang lebih kuat untuk partisipasi politik perempuan.

Dukungan Organisasi Non- Pemerintah: Banyak organisasi non - pemerintah yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan mendukung partisipasi politik mereka. Melalui pelatihan, advokasi, dan pendampingan, organisasi ini membantu memperkuat kapasitas perempuan dalam politik dan memberikan platform untuk mereka menyuarakan aspirasi mereka.

Perubahan Sosial dan Budaya: Perubahan sosial dan budaya yang lebih luas juga menjadi faktor pendorong. Kampanye kesadaran gender dan pendidikan publik dapat membantu mengubah sikap dan persepsi masyarakat

terhadap perempuan dalam politik, serta mengatasi norma - norma patriarki yang menghambat partisipasi politik perempuan.

Jaringan dan Mentorship: Jaringan dukungan dan program mentorship yang kuat dapat membantu perempuan untuk saling mendukung dan membangun keterampilan politik mereka. Dengan mendapatkan bimbingan dan dukungan dari perempuan yang sudah berpengalaman dalam politik, mereka dapat merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk terlibat dalam politik.

b. Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih Perempuan

Upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan diperlukan strategi yang efektif yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi politik. *Pertama*, meningkatkan pendidikan dan kesadaran politik. Perempuan perlu mengikuti pelatihan dan pendidikan politik yang komprehensif, mencakup pengetahuan tentang sistem politik, hak-hak politik, dan keterampilan advokasi. Sejalan dengan hal ini, perempuan juga penting meningkatkan pemahaman literasi agar dapat membuka cakrawala peserta tentang arti penting pendidikan politik. *Kedua*, kesadaran dalam memilih pemimpin yang berkualitas. Kesadaran partisipasi politik merupakan aspek penting dalam tatanan negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik yang berkelanjutan (Rahayu et al., 2023). Pendidikan politik yang baik akan mempersiapkan perempuan untuk memahami dan mengatasi dinamika politik, serta membuat mereka lebih percaya diri dalam berpartisipasi.

Kedua adalah membangun jaringan dan aliansi. Perempuan dapat membentuk jaringan dukungan antar sesama yang aktif dalam politik untuk saling berbagi pengalaman, sumber daya, dan strategi. Selain itu, berkolaborasi dengan organisasi non-pemerintah yang fokus pada pemberdayaan perempuan dan advokasi politik juga dapat memperkuat posisi perempuan dalam politik. Jaringan dan aliansi ini penting untuk memberikan dukungan moral.

Ketiga, pemberian bimbingan dan pelayanan yang berkelanjutan. Seperti yang dilakukan oleh adalah anggota DPRD propinsi Sumatra Barat yang massif memberikan pendidikan untuk kelompok-kelompok masyarakat khusus perempuan yang ada di kota dan kabupaten Solok. Kegiatan ini juga didampingi oleh Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) propinsi Sumatera Barat, sehingga kegiatan ini tepat sasaran.

4. KESIMPULAN

Pemaparan pengabdian tentang pendidikan politik upaya meningkatkan partisipasi pemilih perempuan pada pemilihan 2024 dapat disimpulkan berikut ini. Berdasarkan pemikiran bahwa jumlah pemilih perempuan dan laki-laki hampir sama, adanya asumsi pemilih perempuan lebih loyal, dan sangat sedikit calon kepala daerah perempuan yang muncul. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk *workshop*. Dihadiri oleh 100 orang peserta dari kabupaten Solok yang mewakili kelompok-kelompok yasinan, *club* senam, tokoh Masyarakat-*Bundo Kandunga*, guru PAUD. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2023 di Hotel Premier Kota Solok. Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai politik menjelaskan Pendidikan Politik adalah “proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara". Pendidikan politik memiliki tiga tujuan yaitu. membentuk kepribadian politik, Kesadaran politik, dan Partisipasi politik.

Pendidikan politik ini penting diberikan keluruh pemilih terutama, bagi pemilih perempuan. Hal ini dikarenakan, perlu memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif kaum perempuan, serta meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan hal ini adalah sebagai berikut (a) Minimnya anggaran untuk melakukan pendidikan politik; (b) Pendidikan politik lebih difokuskan pada kader-kader partai; dan (c) Kurangnya kesadaran politik dari para perempuan di Kota Pontianak.

Faktor pendorong dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilihan perempuan dalam pemilihan 2024 ada beberapa faktor. Faktor ini diantaranya kebijakan afirmatif, pendidikan dan kesadaran gender, dukungan organisasi non-pemerintah, perubahan sosial dan budaya, dan jaringan dan mentorship.

Faktor ini dipicu berbagi asumsi ketidakadilan gender seperti yang dijelaskan Mansour Fakih ada lima sebab.

- (1) Terjadi marginalisasi (kemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuan.
- (2) Terjadinya subordinasi pada salah satu jenis *sex*, yang umumnya pada kaum perempuan. Dalam rumah tangga, masyarakat, maupun Negara, banyak kebijakan dibuat tanpa "menganggap penting" kaum perempuan.
- (3) Pelabelan negatif (*stereotype*) terhadap jenis kelamin tertentu, terutama terhadap kaum perempuan dan akibat dari *stereotype* itu terjadi diskriminasi serta ketidakadilan lainnya.
- (4) Kekerasan (*violence*) terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan, karena perbedaan gender kekerasan di sini dimulai dari kekerasan fisik seperti pemerkosaan dan pemukulan, sampai pada kekerasan yang berbentuk lebih halus seperti pelecehan (*Sexual harassment*) dan penciptaan ketergantungan. Banyak sekali kekerasan terjadi pada perempuan yang ditimbulkan karena *stereotype* gender.

Upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan diperlukan strategi yang efektif yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi politik. *Pertama*, meningkatkan pendidikan dan kesadaran politik. *Kedua* adalah membangun jaringan dan aliansi. *Ketiga*, pemberian bimbingan dan pelayanan yang berkelanjutan.

5. SARAN

Saran-saran yang dapat diberikan untuk kegiatan pengabdian ini adalah (1) Kelompok-kelompok masyarakat dapat menjadikan konsep ini sebagai media pembelajaran pendidikan politik di masyarakat (2) Kesbangpol Propinsi Sumatera Barat penting melakukan pembimbingan dan pelayanan pendidikan politik kepada masyarakat secara umum dan khususnya kepada kelompok-kelompok perempuan, dan kelompok lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat, kami selaku dosen Universitas Mahaputra Muhammad Yamin terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok atas dukungan dana yang telah diberikan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian

masyarakat yang berjudul “Pendidikan Politik upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Menghadapi Pemilihan tahun 2024.” Terima kasih juga kami sampaikan kepada Kesbangpol propinsi Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzan, I. (2017). VOLUME 17, NOMOR 1, OKTOBER 2017 15 POLITIK DAN PEREMPUAN DI INDONESIA PASCA REFORMASI Oleh: Indra Fauzan □. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 17.
- Kahpi, L. (2024). Analisis Partisipasi Politik Perempuan Di Indonesia: Faktor Penghambat Dan Pendorong. *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, Volume 8(1), 1–14.
<http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/JurnalGender/indexDOI:http://dx.doi.org/10.24952/gender.v8i1.11067%0Ahttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- Omami, T. (2017). Peran Pendidikan Politik Bagi Perempuan Menurut Prinsip Keadilan Dan Kesetaraan Gender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Studi Pada DPC Partai PDI Perjuangan. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 24.
- Rahayu, Z. R. (2024). Mendorong Partisipasi Pemilih Perempuan. *Singgalang*.
- Rahayu, Z. R., Mahaputra, U., Yamin, M., Sepyanda, M., Mahaputra, U., Yamin, M., Handayani, F., Mahaputra, U., & Yamin, M. (2023). *PEMAHAMAN KONSEP LITERASI POLITIK PADA PEREMPUAN KECAMATAN X KOTO*. 4(2), 255–262.
- Soeharto, A. (2012). Urgensi Pendidikan Politik Bagi Perempuan. *Muwazah*, 3(1), 325–333. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v3i1.7>

